

**KERAJAAN BALANIPA PADA MASA KEKUASAAN
I MANDAWARI 1870-1906**
(*BALANIPA KINGDOM ON THE THRONE OF I MANDAWARI 1870-1906*)

Abd. Karim
Universitas Indonesia
karimhistory92@gmail.com
[082337160233](tel:082337160233)

ABSTRACT

Balanipa kingdom was completely controlled by the Dutch in 1909. This period was the beginning of the formation of Mandar Section. The establishment of Mandar Section certainly experienced a long process. This article examines the initial milestones of Mandar authorization. The process not only involved the Dutch as invaders but also the elite of Balanipa Kingdom. The elites indirectly encourage for the authorization because these elites agreed to the agreement or political contracts of Balanipa and the Netherlands Kingdom. The contract then encouraged the creation of political policy at Mandar. The question is, what kind of policy taken by I Mandawari during his leadership period? How are the policies implemented? and what is the effect of the policy? to answer those questions, this article uses a historical method consisting of heuristics, criticic, interpretation, and historiography.

Keywords: *I Mandawari, political policy, Balanipa kingdom, Mandar.*

ABSTRACT

Kerajaan Balanipa dikuasai secara utuh oleh Belanda pada tahun 1909. Periode tersebut merupakan awal terbentuknya Afdeling Mandar. Terbentuknya Afdeling Mandar tentu mengalami proses yang cukup panjang. Artikel ini, mengkaji tentang tonggak awal dari penguasaan Mandar. Proses tersebut tidak hanya melibatkan Belanda sebagai penjajah tetapi juga elit-elit Kerajaan Balanipa. Elit-elit tersebut secara tidak langsung mendorong terjadinya penguasaan tersebut karena Elit-elit inilah menyetujui perjanjian atau kontrak-kontrak politik Kerajaan Balanipa dan Belanda. Kontrak tersebut kemudian mendorong terciptanya kebijakan politik di Mandar. Pertanyaan adalah, kebijakan apa yang ditempuh oleh I Mandawari dalam periode kepemimpinannya ? Bagaimana kebijakan-kebijakan itu dijalankan ? dan apa dampak dari kebijakan tersebut ? untuk menjawab pertanyaan tersebut maka artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Kata kunci: *I Mandawari, Kebijakan Politik, Kerajaan Balanipa, Mandar.*

PENDAHULUAN

Pada 1870 Belanda mengangkat I Mandawari sebagai Raja Balanipa yang disertai dengan penandatanganan kontrak (Boom 1912: 534). Periode tersebut merupakan langkah awal Pemerintah Hindia Belanda dalam menanamkan pengaruhnya di Mandar. Pengaruh Belanda tidak hanya menargetkan monopoli perdagangan tetapi juga dalam sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa. Balanipa dipilih menjadi sasaran utama karena Kerajaan tersebut

merupakan kepala dari persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga* di Mandar (Mandra, 2002: 97). Periode tersebut merupakan genderang awal jatuhnya Kerajaan Balanipa.

Kebijakan Mandawari sebagai *mara'dia* (raja) pada masa pemerintahannya merupakan langkah politik yang dimanfaatkan oleh Belanda. Meskipun dalam periode sebelumnya yakni pada 1825-1862 Mandar telah melakukan kontrak politik dengan Belanda (Boom, 1912: 534). Tetapi dalam

periode tersebut Belanda belum mempunyai otoritas atas pemerintahan Kerajaan Balanipa. Tidak adanya otoritas tersebut karena Belanda masih mematuhi perjanjian antara Mandar-Bone-Belanda pada tahun 1825 di Makassar. Perjanjian tersebut mencapai kesepakatan “Kami sangat bergembira dan bersyukur kalau Anda menghargai perkataan kami”. Berkata pula Mandar, “Kami dukung Bone selama adat kami, kami pakai” (Syah, 1992: 80). Tetapi setelah I Mandawari menandatangani kontrak pada 1870, adat Mandar sudah tidak dijunjung tinggi lagi oleh Belanda, dengan kata lain Belanda melanggar perjanjian yang telah disepakati pada tahun 1825.

Langkah politik yang ditempuh oleh I Mandawari tentu telah difraikirkan matang matang. Berstatus sebagai seorang *maradia* tentu saja I Mandawari mempunyai kecakapan dalam memimpin, baik itu kecakapan berdiplomasi maupun konfrontasi. Meski disisi lain, Mandar mengalami banyak kerugian sebagai dampak dari kontrak-kontrak politik yang sepakati oleh I Mandawari sebagai *Mara'di* Balanipa. Kontrak-kontrak tersebut kemudian menggiring I Mandawari untuk menentukan kebijakan dalam mengelola kerajaan. Pertanyaannya adalah, Kebijakan apa yang ditempuh oleh I Mandawari dalam periode kepemimpinannya? Bagaimana kebijakan-kebijakan itu dijalankan? dan apa dampak dari kebijakan tersebut?

METODE

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penulis memperoleh sumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip Pemerintah Hindia Belanda. Arsip tersebut berupa catatan-catatan berupa laporan pejabat daerah tanah jajahan Belanda dan kontrak-kontrak politik. Adapun sumber lontara' diperoleh dari Perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan di Makassar dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan. Kemudian penulis memilah sumber dan melakukan proses kritik terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya dari

hasil kritik sumber tersebut, Penulis kemudian menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masa periode kepemimpinan I Mandawari 1870-1906. Terakhir Historiografi merupakan proses penulisan sebuah peristiwa menjadi tulisan sejarah.

Penulis melihat periode ini merupakan periode awal dari jatuhnya Kerajaan Balanipa sebagai kerajaan yang cukup sulit untuk ditaklukkan oleh Belanda. Tercatat Penguasaan Mandar sebagai negara bawahan atau secara keseluruhan baru terjadi pada tahun 1909 (Arsip Nasional, Memori Van Overgave Serie 1E: 22). Belanda butuh waktu yang cukup panjang untuk berkuasa di Mandar sangat berbeda dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan. Artikel ini menjadi penting karena mengulas tentang bagaimana proses awal jatuhnya Kerajaan Balanipa dilihat dari sudut pandang politik. Sistem pemerintahan yang telah dibangun sejak abad XVI, mengalami pergeseran setelah hadirnya Belanda sebagai struktur lain yang mempengaruhi struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa bahkan di seluruh wilayah Mandar. Pergeseran tersebut, tidak hanya disebabkan oleh Belanda tetapi juga beberapa bagian penting dalam sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa termasuk *maradia* terutama pada masa pemerintahan I Mandawari 1870-1906.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan I Mandawari 1870-1872

1. Kontrak Politik Balanipa-Belanda

Kerajaan Balanipa sebelum kedatangan Belanda merupakan kerajaan yang makmur dan menjunjung tinggi adat istiadat. Namun setelah kedatangan Belanda perubahan signifikan terjadi di Kerajaan Balanipa terutama di bidang pemerintahan. Perubahan tersebut sebagai akibat dari ikut campurnya Pemerintah Hindia Belanda dalam urusan politik kerajaan. Belanda kemudian menjadi penentu kebijakan Kerajaan Balanipa termasuk dalam proses pengangkatan *maradia*. Usaha sistematis Belanda dimulai pada tahun 1825 ketika Mandar-Bone-Belanda melakukan pertemuan di Makassar dan mencapai kesepakatan Belanda dan Mandar adalah sekutu namun Belanda tidak memiliki otoritas di Mandar

karena Mandar tetap pada pendiriannya, menjunjung tinggi adat istiadat. Perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 22 Agustus 1825 di Makassar (Boom 1912: 534).

Meski pada tahun 1667 Kerajaan Balanipa dan Gowa dikalahkan oleh Belanda bersama dengan Kerajaan Bone dalam Perang Makassar, pada tahun itu pula seorang *mara'dia* yang diakui keberaniannya oleh orang-orang Gowa gugur, kemudian dalam lontara' dikisahkan,

...dan diapun melepaskan tembakan dan mengena keningnya. Terkena juga pembawa payungnya orang Balanipa pada peperangan itu tewas. Diberilah ia gelar amumerta : "Todiposso di Galesong". Dia juga bergelar "Tomatinto di Buttu" (Syah, 1992: 74).

Penggalan catatan lontara' diatas menegaskan bahwa Kerajaan Balanipa turut membantu Kerajaan Gowa dalam melawan Belanda yang bersekutu dengan Kerajaan Bone "dia" yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah Arung Palakka To Malempek Gemmekna (Syah, 1992: 74).

Setelah Perang Makassar, Belanda mulai menanamkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan sampai ke Mandar. Berikutnya Bone yang dibantu oleh Belanda menyerang Mandar, pada akhirnya Mandar dan Bone melakukan perjanjian di Lanrisang pada tahun 1674.¹ Terjadinya kesepakatan antara Bone dengan Mandar untuk berdamai merupakan awal dimana Belanda mulai masuk ke *lita'* Mandar karena dibelakang Bone saat itu adalah Belanda. Terlebih lagi pada tanggal 10 Oktober

1674 ditanda tangani "Banggai Tractaat"² yaitu kerja sama antara Mandar Pitu Ba'bana Binanga yang diwakili oleh Tomatindo di Langgana dan Belanda diwakili oleh Residen Harthoufer (Sinrang, 1994: 112). Perjanjian tersebut merupakan langkah awal Belanda di Mandar namun Belanda saat itu belum menguasai Mandar secara utuh, berbeda dengan Distrik Makassar, Bulukumba, Bantaeng. Artinya status Mandar bukan tanah jajahan.

Terlebih lagi ketika lahirnya Undang-Undang Agraria (1870) yang merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak Belanda pada masa Hindia Belanda. Kebijakan merupakan langkah yang diambil oleh Belanda setelah program tanam paksa gagal. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada hak pemilik tanah sebagai

² Banggai *Tractact* merupakan perjanjian yang dilakukan antara Mandar dengan Belanda pada tanggal 10 oktober 1674, disebut Banggai Tractact karena perjanjian ini dilakukan di Banggai Majene. Perjanjian ini dilatar belakangi konflik antara Mandar-Belanda dimana saat itu terjadi perangan Mandar-Belanda. perjuangan rakyat Mandar dalam melawan Belanda berakhir dan berakibat disepakatinya penjanjian Banggai tersebut. Isi dari perjanjian ini dikatakan sebagai lanjutan dari Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 Oktober 1667. Berikut isi dari Banggai Tractact dalam catatan W.J. Leyds "dalam kontrak tersebut ditetapkan : bahwa akan dibayar sejumlah ganti rugi, sahabat kompeni adalah sahabatnya, musuh kompeni juga musuhnya jika dipanggil harus ke Makassar, pelarian-pelarian harus di tangkap dan diperhadapkan jika keluar dari negerinya harus mendapat pas di Makassar, tidak boleh melayari sungai-sungai di Sulawesi tanpa izin dari residen semua perdagangan harus dilakukan dengan kompeni dan kompeni mempunyai kebebasan melayari sungai-sungai di Mandar dan mendirikan Benteng-benteng dan sebagainya; Lingkungan Binanga-Karaeng (nama dari sungai yang menjadi perbatasan antara Binuang dan ajatappareng), Kadokang dan... (tidak terbaca) harus dikembalikan kepada Sawitto; 30 budak harus diberikan kepada kompeni sebagai ganti rugi atas biaya peperangan". Dari isi perjanjian diatas dapat ditelaah bahwa Mandar saat itu betul-betul kalah atas Belanda dilihat dari isi perjanjian satupun tidak ada yang menguntungkan pihak Mandar. Adapun alasan mengapa Banggai dijadikan sebagai tempat penandatanganan perjanjian karena posisi Banggai yang strategis dan sangat cocok dijadikan sebagai daerah pusat pemerintahan karena Balanipa saat itu masih berbahaya bagi Belanda. artinya Kerajaan Balanipa dan Masyarakatnya pada saat itu belum bisa menerima Belanda (Hanoch 2006).

¹ Perjanjian Lanrisang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Mandar dan Bone dimana pada mulanya Mandar sama sekali tidak mau melakukan perjanjian dengan Bone yang notabenenya pada saat itu bekerja sama dengan Belanda. Namun dengan bujukan Bone yang menyakinkan pihak Mandar bahwa di Lanrisang tidak akan ada satupun orang Belanda. Akhirnya Mandar juga bersepakat untuk berdamai, tentunya ada juga keuntungan yang diperoleh oleh Mandar apabila melakukan perjanjian. *mara'dia* yang memerintah pada saat itu adalah Daeng Rioso. Namun setelah perjanjian ini Mandar telah berdamai dengan Bone dan melakukan kerjasama yang otomatis Mandar juga bekerjasama dengan Belanda karena Belanda pada saat itu berada di Belakang Bone (Syah 1992, 78-79) (Sinrang 1994, 112).

hak pemilik mutlak sehingga memungkinkan penjualan dan persewaan dan pengusaha swasta diberi kesempatan untuk dapat menyewa tanah dalam jangka panjang dan murah. Kondisi inilah yang kemungkinan menjadi sebab lain dari pembaharuan-pembaharuan kontrak Belanda dengan Mandar dan konflik antara keduanya merupakan celah bagi Belanda untuk memperbaharui kontrak.

Meskipun latar belakang dari undang-undang tersebut merupakan kecaman dari politikus liberal Belanda yang tidak setuju dengan tanam paksa yang diberlakukan di Jawa. Namun dalam perkembangannya undang-undang tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak pemodal dalam hal ini adalah pemerintah Belanda. Kebijakan-kebijakan ini tentunya sangat berpengaruh di daerah lain yang termasuk dalam tanah jajahan Belanda termasuk di Mandar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terjadi konflik antara Mandar-Belanda sebagai akibat pelanggaran kontrak-kontrak sebelumnya dan pada tahun yang sama yakni 1870 Kerajaan Balanipa diperintah oleh *Mara'dia* I Mandawari, yang diangkat sebagai *mara'dia*, (Boom 1912)

I Mandawari merupakan Raja Balanipa Ke-45, 47 dan 49 yang merupakan anak dari *Mara'dia* Balanipa ke 44 yakni Maulana Passaleppa dan bersaudara dengan Mararabali yang merupakan Raja Banggae. (Sinrang 1994, 142) beliau bergelar *Mara'dia Kecce'* atau *Tomelloi* beliau juga disebut *Ammama Icalla'*. (Syah 1992, 98) Pada masa jabatan pertama I Mandawari sebagai *Mara'dia* Balanipa yakni pada tahun 1870 yang menggantikan ayahnya *Maulana Passaleppa*³ dan mengadakan perjanjian dengan Belanda dengan membayar denda akibat dari peristiwa sebelumnya yang terjadi pada November 1867. Terkait dengan pengangkatan Mandawari sebagai *mara'dia* dan kesepakatan dengan Belanda,

³ Maulana Passaleppa adalah ayah dari Mandawari dimana pada masa jabatannya sebagai *mara'dia* beliau tidak dipecat namun diberhentikan karena usianya yang sudah sangat tua hal ini sama dengan apa yang dialami oleh anaknya mandawari dimana diakhir jabatannya sebagai *mara'dia* beliau tidak dipecat namun mengundurkan diri berdasarkan keputusan Belanda karena usianya yang sudah sangat tua.

Hasil selanjutnya untuk sementara dalam tahun 1870, Maradia Malolo dari Majene yang bernama Manawari dipilih menjadi Raja, dan dengan hadat pergi ke Makassar.

Dari ganti rugi yang dituntut sebanyak f3.500.- dibayar dengan mencicil yang dilakukan oleh raja. Sebelum itu didahului suatu pengukuhan dengan kontrak baru dari Manawari Sebagai Raja Baru Balanipa... (Boom 1912)

Hal tersebut menggambarkan bahwa Mandawari (Manawari) pada 1870 dipilih menjadi *Mara'dia* Balanipa dan yang perlu diketahui bahwa sebelum I Mandawari menjadi *mara'dia*, ia pernah menjabat sebagai *Mara'dia Malolo* di Majene yang merupakan pimpinan dari seluruh pasukan kerajaan. Mengenai ganti rugi yang ditanggung oleh Kerajaan Balanipa karena perompakan kapal Belanda di Selat Makassar yang tidak kunjung teratasi oleh Kerajaan Balanipa sebagai kerajaan yang memimpin dalam Federasi *Pitu Ba'bana Binanga*. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh Mandar dan Belanda pada tahun 1850.

Terkait tentang masalah yang kemudian menjadi awal perselisihan antara Mandar-Belanda yang berujung kepada pembakaran istana Kerajaan Banggai adalah, dengan persetujuan kontrak dengan Belanda bahwa pada tahun 1864 raja-raja yang ada di Mandar terkhusus kepada Federasi Pitu Ba'bana Binanga untuk hadir di Makassar untuk mencapai kesepakatan tentang perampokan terhadap kapal-kapal milik Belanda apabila berlayar disekitar perairan Mandar, untuk menyelesaikan perkara ini Belanda pun mengirim *Sekretaris v/d Inlandsche Zaken Voll* untuk mengurus masalah tersebut namun *mara'dia* tidak suka dengan tindakan tersebut dan mengusirnya dari Mandar (Boom 1912: 531) hal ini membuat situasi semakin memburuk dan akhirnya dengan keputusan Gubernemen tanggal 19 mei 1866 No 26 memberikan kekuasaan untuk mengambil tindakan keras terhadap Kerajaan yang melakukan pelanggaran kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Tindakan keras yang dimaksudkan di atas merupakan tindakan secara militer yang berakibat dibakarnya istana Kerajaan Banggai pada tahun 1867 oleh tentara Marine Belanda (Sinrang, 1994: 142).

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa konflik yang terjadi antara Mandar dengan Belanda pada dasarnya terjadi karena Belanda yang tidak menghormati adat istiadat. Salah satu sikap Belanda yang tidak menghormati adat istiadat yakni mengirim *Sekretaris v/d Inlandsche Zaken Voll* (jabatan sekretaris urusan pribumi) untuk mengurus urusan Rakyat Mandar dimana ini dipandang bahwa Belanda akan mencampuri urusan kerajaan hal ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Tindakan perompakan yang dilakukan oleh masyarakat Mandar terhadap kapal-kapal milik Belanda merupakan respon Rakyat Mandar karena Belanda ingin memonopoli perdagangan kopra di Mandar. Namun pada akhirnya berbagai konflik dapat diredam setelah beberapa ekspedisi militer Belanda dilancarkan dan berbagai kontrak politik disetujui.

Terutama ketika I Mandawari menjabat sebagai Raja Balanipa dan menyetujui ganti rugi kepada Belanda pada 1870 (Hanoch 2006). Masa pemerintahan I Mandawari yang pertama, Belanda semakin melebarkan sayapnya di Mandar. Belanda mulai bebas bergerak di Mandar namun belum ada perubahan yang signifikan terjadi di Kerajaan Balanipa saat itu. Kepemimpinan Mandawari saat itu belum mengalami goncangan yang berarti hanya saja kebiasaan *Mara'dia* Balanipa yakni I Mandawari yang kurang di terima oleh kaum adat yaitu kerjanya hanya bermalas malasan, dan menghisap candu. Inilah yang menyebabkan beliau bergelar *Tomelloli*. (Idham, 2010: 45)

2. Perlawanan Tokape

Mandawari pada masa pemerintahannya 1870-1872 mampu meredam konflik antara Mandar-Belanda dengan ditandatangani kontrak antara Balanipa dengan Belanda di mana isi dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa Balanipa tidak akan mempengaruhi kerajaan-kerajaan lainnya.

In 1870 volgde het contract met den nieuwen vorst Manawari van Balanipa. bij dit contract werd de titel "hoofdvorst van Mandar" afgechaft en bepaald dat dit rijk geen gezag meer heeft de andere rijken van Mandar

Artinya : dalam tahun 1870 berikut ditanda tangani kembali kontrak dengan Raja Balanipa yang baru, Mandawari dalam kontrak ini telah dicabut gelaran "*Hoofddvorst van Mandar*" dan ditetapkan bahwa kerajaan ini (Balanipa) tidak akan mempengaruhi lagi kerajaan-kerajaan lainnya (Sinrang, 1994: 156).

Sikap Mandawari yang sepakat dengan Belanda memang meredam konflik antara Mandar-Belanda namun hal tersebut menyulut konflik internal antara Mandawari dengan kaum hadatnya di Mandar termasuk Tokape. Keputusan Mandawari dianggap sebagai sikap pro terhadap Belanda dan merupakan pelanggaran terhadap pesan raja-raja sebelumnya yakni Mandar tidak akan melakukan hubungan diplomatik dengan Belanda apabila Belanda melanggar adat yang dijunjung tinggi di Mandar (Syah, 1992: 80). Namun apabila ditelaah dari sisi lain, sikap I Mandawari yang menandatangani kontrak dengan Belanda dapat mengamankan kerajaan dari serangan Belanda. bercermin dari peristiwa serangan Belanda yang menyerang Mandar dengan tiga kapal perang tetapi tidak menyerang Pambusuang karena mengibarkan bendera putih (Syah, 1992: 96). Pesan yang ingin disampaikan dalam teks lontara' adalah Pambusuang terlindungi oleh Mandawari karena kediamannya berada di Pambusuang. I Mandawari berasal dari Pambusuang.

Ketika Mandawari menandatangani kontrak dengan Belanda, Mandar aman dari ancaman Belanda dan aman dari serangan Belanda. Kemudian Balanipa sebagai kerajaan yang sangat berpengaruh di Mandar Membuka jalan seluas-luasnya bagi Belanda untuk menanamkan pengaruhnya di Mandar. Kondisi inilah yang kemudian menjadi pemicu dari konflik internal tersebut karena kaum hadat Mandar yang notabenenya tidak pernah setuju dengan kedatangan Belanda. Konflik internal tersebut terjadi pada tahun 1872 yang dikenal dengan pemberontakan Tokape (Mappangara, 2004: 335).

Pada 1872 merupakan puncak dari konflik internal yang terjadi antara I Mandawari sebagai *Mara'dia* Balanipa dengan Tokape yang didukung oleh kaum hadat. Tokape dianggap memberontak terhadap Belanda karena berani melawan Belanda dengan menyatakan sikap secara terang-

terangan dengan menolak kedatangan Belanda di Mandar dan menurunkan I Mandawari sebagai *Mara'dia* Balanipa. Sikap tersebut secara tidak langsung menunjukkan penolakan kontrak yang telah disepakati oleh I Mandawari dengan Belanda. I Mandawari pada 1872 resmi diturunkan oleh Hadat Mandar sebagai *Mara'dia* Balanipa dan digantikan oleh sepupu sekalnya Baso dengan gelarnya Tokape.

Mandawari werd in 1872 verdreven door Kape-de grootvader van den tegenwoordigen Mara'dia Andi Baso-, die de regeering negeerde, reden waarom deze, Mandawari in zijn functie herstelde.

Artinya : pada 1872 Mandawari diusir oleh Kape-nenek dari *Mara'dia* yang ada sekarang Andi Baso-, yang menolak kedatangan Pemerintah *Gubernemen* sebagai alasan mengapa beliau menggantikan Mandawari dalam jabatannya (Sinrang, 1994: 150).

Narasi di atas menjelaskan sikap Tokape yang menolak kedatangan Belanda di Mandar. Setelah penolakan tersebut mengindikasikan bahwa Tokape menolak untuk melakukan kerjasama dengan Belanda di segala bidang. Sikap Tokape ini dianggap oleh Belanda sebagai pemberontakan terhadap Belanda. Pengusiran Mandawari menunjukkan bahwa ia kalah dari sepupu sekalnya yakni Tokape.

Kekalahan I Mandawari atas Tokape disebabkan oleh Tokape mendapat dukungan dari rakyat beserta kaum hadat Balanipa dan I Mandawari pada saat itu mendapat dukungan dari pihak Belanda terbukti ketika I Mandawari kalah, ia menyingkir ke Pamboang seperti yang disebutkan dalam lontarak bahwa :

...Mara'dia Kecer dikepung karena sebagian orang Balanipa menjadi lawan.

Tomelloli' menyingkir ke Pamboang dengan gendang, kemudian dari Pamboang beliau terus ke Ujung Pandang, setelah beliau berada di Ujung Pandang, *Appe Banua Kaiyyang* ke Pamboang untuk mengambil gendang itu (Syah, 1992: 100).

Menyingkirnya Mandawari ke Ujung Pandang menunjukkan bahwa Mandawari saat itu meminta perlindungan Belanda atas sikap sebagian orang-orang Balanipa, inilah yang membuktikan bahwa saat itu Mandawari sebagai mantan *mara'dia* berada di pihak Belanda. Menyingkirnya Mandawari ke Ujung

Pandang membuat kepemimpinan *Mara'dia* Balanipa di pegang oleh I Boroa Tokape dan dilantik langsung oleh *Appe' Banua Kaiyyang* beserta *ada' sappulo sokko'*. Terangkatnya Tokape menjadi *Mara'dia* Balanipa ke-46 membuat Kerajaan Balanipa lebih aman dan tentram. Dalam lontara' dijelaskan bahwa.

Pada waktu Tokape menjadi *mara'dia* di Balanipa, kerajaan langsung menjadi aman. Walau pintu rumah orang Balanipa tidak ditutup tidak ada kecurian. Berkata para Hadat : " Besok atau lusa ada orang kecurian kemudian kedapatan, bunuh saja pencurinya. Dengan demikian aman sudah Balanipa (Syah, 1992: 101).

Kerajaan Balanipa menjadi aman, kalimat ini perlu ditelaah kembali sebelum dicerna, Balanipa memang aman dari berbagai pencurian perompakan, namun Mandar pada saat Tokape memerintah sangat tidak aman terhadap pasukan Belanda yang menganggap Tokape merupakan pemberontak yang berani melawan Belanda. Terbukti di berbagai tulisan sejarah bahwa Belanda setelah Tokape diangkat menjadi *mara'dia* beberapa kali melakukan Ekpedisi Militer, bahkan gerakan Tokape ini dianggap sebagai perlawanan terbesar ke-5 kalinya dari rakyat Mandar dalam melawan kolonialisme Belanda. Pemberontakan ini diakui langsung oleh Gubernur Selebes J.L.Couvreur (Idham, 2010: 150). Meskipun pada akhirnya perjuangan rakyat Mandar ini dapat diredam dan dihentikan oleh pihak Belanda dengan menangkap Tokape dan mengasingkannya ke Pacitan Madiun pada tahun 1873 dan digantikan oleh Mandawari (Hanoch, 2006: 36).

Periode Kepemimpinan I Mandawari 1873-1880

1. Diangkat Sebagai *Mara'dia* Balanipa

Diasingkannya Tokape Ke Pacitan Madiun menandai bahwa Belanda berhasil meredam dan mengatasi pemberontakan yang dilakukan Tokape terhadap Belanda dan diangkatnya Mandawari sebagai *Mara'dia* Balanipa ke-47 atas kehendak Belanda. Seperti yang tertulis dalam lontarak bahwa,

Setelah Tokape hilang, sepupu sekalnya kembali menggantikan, atas kehendak Belanda bernama Imannawari.

Ammana Icalla' kembali jadi *Mara'dia* Balanipa berdasarkan keputusan Belanda. Ammana Icalla' kembali jadi *Mara'dia* Balanipa atas kehendak *Gubernamen*. Sekembalinya dari Ujung Pandang I Puwang Bakarang beliau membawa kontrak dan menyerahkannya ke *Mara'dia* Kecce untuk menjalankan pemerintahan di Balanipa (Syah, 1992: 102).

Kutipan di atas menegaskan bahwa terangkatnya Mandawari sebagai *Mara'dia* Balanipa merupakan Kehendak Belanda, untuk tujuan penguasaan Mandar. Kutipan tersebut juga menggambarkan bahwa *Mara'dia* Kecce (Mandawari) mendapat perintah dari *Gubernemen* dengan penyetujuan kontrak dengan Belanda. Belanda memerintah *mara'dia* ini menegaskan bahwa Mandawari merupakan *Mara'dia* Balanipa yang pro terhadap Belanda.

Kondisi kerajaan pada masa pemerintahan Mandawari untuk kedua kalinya aman-aman saja, penulis belum menemukan satu sumberpun yang menyatakan terjadinya konflik internal maupun eksternal, konflik internal yakni dengan kaum Hadatnya sendiri seperti yang terjadi ketika masa jabatan pertamanya dan konflik eksternal dengan pihak Belanda. Artinya pada masa ini belum ada gambaran pasti tentang Kerajaan Balanipa namun dapat kita telaah bahwa tidak adanya informasi tentang konflik Kerajaan Balanipa pada 1873-1880 mengindikasikan bahwa sikap I Mandawari yang mendukung kerjasama dengan pihak Belanda berhasil mengamankan Mandar dari serangan militer Belanda yang sewaktu-waktu dapat dilancarkan. Namun dilain hal, tentunya masalah yang membuat Tokape melakukan perlawanan terhadap Belanda adalah masalah perdagangan kopra muncul kembali. Dimana Belanda membeli kopra dari rakyat dengan harga yang murah membuat rakyat tercekik.

Sikap politis I Mandawari yang menyetujui perjanjian kontrak dengan Belanda mengindikasikan bahwa I Mandawari pro terhadap Belanda dan sikap ini yang menimbulkan beberapa pendapat bahwa Mandawari pada masa ini mengkhianati Rakyat Mandar, mengabaikan perjuangan Tokape dalam mempertahankan Mandar dimana Tokape juga berkonflik dengan Mandawari. Inilah politik adu

domba yang dilancarkan oleh Belanda terhadap Kerajaan Balanipa. Kondisi Kerajaan Balanipa sebelum I Mandawari menjabat sangat kacau karena sebagai perjanjian/kontrak politik di tanda tangani dan di langgar membawa dampak buruk. Ketika Mandawari menjabat sebagai *Mara'dia* Balanipa terjadi konflik karena penanda-tanganan kontrak dengan Belanda dan Mandawari dianggap tidak pantas menjadi *mara'dia* karena kerjanya hanya bermalas malasan dan menghisap candu terjadilah konflik internal.

Ketika terjadi konflik internal Belanda pun masuk dengan politik adu dombanya memanfaatkan konflik antara Mandawari dengan kaum Hadatnya yang dipimpin Tokape. Belanda berupaya mendukung Mandawari dengan dalih memberantas pemberontakan Tokape karena melanggar perjanjian. Setelah Tokape ditangkap dan diasingkan Belanda mengangkat Mandawari menjadi *Mara'dia* Balanipa menggantikan Tokape. Hal inilah yang menimbulkan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Mandawari adalah pengkhianat. Sandiwara politik adudomba yang sempurna.

Syaiful sinrang dalam tulisannya menyatakan bahwa "Mandawari adalah seorang raja yang politikus yang berpura-pura kerja sama dengan Belanda" dengan berdasar kepada bukti bahwa :

- a. Golongan Mandawari dan Tokape tidak pernah terjadi bentrokan senjata.
- b. Dalam penumpasan kelompok Tokape oleh Belanda kelompok Mandawari tidak pernah ikut campur.
- c. Sewaktu Tokape tertangkap, tak satupun sumber yang menyatakan bahwa pengikut I Mandawari sebagai pihak yang dianggap menang turut menindas pengikut Tokape (Sinrang, 1994: 158-159).
- d. Dan satu tambahan dari penulis bahwa I Mandawari setelah ia dicopot dari jabatannya pernah ingin di tangkap oleh Belanda namun Mandawari menyingkir atas saran Tokape yang pada saat itu menjabat sebagai *mara'dia* di Balanipa (Syah, 1992: 101-102).

Sikap Mandawari dan Tokape di atas menggambarkan bahwa pada masa tersebut mereka berselisih setengah hati. Mereka merupakan korban dari politik adu domba yang dilakukan oleh pihak Belanda.

2. Mandawari *Arajang Melloli*

Masa pemerintahan Mandawari 1873-1880 dilalui dengan nasib Balanipa berada di tangan Belanda, tidak adanya pergolakan melawan Belanda di Mandar karena Mandawari siap untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Belanda. Kebiasaan Mandawari yang hanya bermalas-malasan dan menghisap candu menjadi peluang yang sangat besar untuk bergerak bebas di Balanipa. Terlebih lagi Mandawari yang sangat suka menghisap candu dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda, dengan memberikan candu kepada Mandawari agar ia tidak ada kesempatan untuk mengurus kerajaan dan rakyat.

Kaum hadat juga menyadari hal tersebut dengan bertahannya jabatan I Mandawari sebagai *Mara'dia* Balanipa cukup lama dari sebelumnya maka rakyat akan semakin menderita. sifat Mandawari yang hanya bermalas-malasan dan menghisap candu dianggap oleh kaum hadat sebagai sikap yang tidak terpuji dan tidak patut dicontoh oleh masyarakat serta bertentangan dengan asas-asas kepemimpinan yang dimiliki oleh Kerajaan Balanipa. akhirnya pada tahun 1880 Mandawari digantikan oleh Sanggaria (Sinrang, 1994: 156).

Digantikannya Mandawari oleh Sanggaria 1880 merupakan keputusan hadat Mandar karena mengalami pertentangan dengan kaum Hadat, seperti yang tertulis dalam tulisan Belanda yakni :

In 1880 ging het toch mis met Manawari; hij had de Hadat tegen zich gekregen, waar deze met een nieuw gekozen Maradia, en wel den uit Madjene verjaagden Sanggaria naar Makassae trok, waar men, inziende dat Manawari zich niet kon handhaven, Sanggaria als Maradia accepteerde.

Artinya :

Dalam tahun 1880 Manawari (Mandawari) mendapat kesulitan-kesulitan. Beliau bertentangan dengan Hadatnya sehingga Hadat bersama-sama raja baru terpilih, yaitu Sanggaria yang terusir dari Majene, pergi ke Makassar dan karena Mandawari tidak lagi dapat dipertahankan maka Sanggaria dapat diterima sebagai *mara'dia* (Sinrang, 1994: 156).

Tertulis dalam kutipan bahwa Mandawari mendapat kesulitan-kesulitan dengan Hadat, kesulitan yang di maksud adalah karena hadat

tidak suka dengan sikap Mandawari. Sanggaria yang terpilih oleh Hadat ke Makassar, kalimat ini menggambarkan bahwa setelah Sanggaria terpilih menjadi *mara'dia* menggantikan Mandawari Sanggaria ke Makassar apa yang kemudian menjadi tujuan Sanggaria ke Makassar tidak lain adalah untuk mendapatkan persetujuan Belanda atas terangkatnya menjadi *mara'dia*. Ini menunjukkan bahwa pada saat dan setelah Mandawari menjabat sebagai *Mara'dia* Balanipa pengaruh Belanda terhadap pemerintahan Kerajaan Balanipa sudah sangat kuat.

Periode Kepemimpinan I Mandawari 1885-1906

1. Menggantikan Sanggaria

Pada 1885-1906 merupakan periode ke tiga kalinya I Mandawari dalam memerintah setelah menggantikan Sanggaria yang telah menggantikan beliau sebelumnya (Boom, 1912: 534). Sanggaria yang menggantikan Mandawari memerintah Balanipa selama 5 tahun dapat dilihat tahun digantikannya Mandawari yakni 1880 dan digantikannya Sanggaria tahun 1885. Selama kepemimpinan Sanggaria tidak tertulis jelas dalam sumber lontarak namun sebab dipecatnya Sanggaria dari *Mara'dia* Balanipa digambarkan bahwa Sanggaria bermasalah dengan orang-orang Balanipa termasuk Mandawari. Lebih lanjut dalam lontarak dijelaskan

Setelah diangkat menjadi *mara'dia* istana Banggae dipindahkan ke Marica dibangun dan masuk Ipuang Rengge Puwang Limboro dan dia kawinkan kemanakannya dengan *Mara'dia* Kecce' yang bernama Idalauleng. Sudah itu..... dia temui sesamanya Hadat..... dan dia katakan : " kalau tuhan menghendaki Beliaulah yang akan menjadi *mara'dia*. Sebab saya bukan jabatan *mara'dia* saya cita-citakan Puwang.

Menjawab Puwang limboro : "kuharap *mara'dia* bersabar saja" terdengar oleh Tomelloli kehendak sepupupu sekalinnya. Berkata Tomelloli kepada Puwang Limboro : "antar kemari gendang itu puwang, nanti disini diarak kesitu!" didengar Tonaung anjoro. Dijawab: "bahwa tidak benar kehendak sepupuku nanti orang menuding saya bahwa gendang itu ditukar dengan laki-laki". Bertengkarlah mereka dan gagal sampai orang Balanipa datang mengawinkan

...bersedih orang Balanipa Tonaung Anjoro diturunkan dari tahta.... (Sinrang, 1994: 157)

Kutipan di atas menggambarkan bahwa Sanggaria sebelumnya tidak ada niat untuk menjadi *ara'dia* dan Mandawari saat itu mendengar hal tersebut dan ingin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan adat. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara keduanya di mana pada saat itu Sanggaria terpojok dan membuat orang-orang Balanipa kecewa atau bersedih akhirnya Mandawari kembali menduduki tahta. Dapat kita telaah bahwa dipecatnya Sanggaria sebagai *mara'dia* saat itu disebabkan oleh sikap Mandawari yang ingin bertindak tidak sesuai dengan adat secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Mandawari menginginkan posisi *mara'dia* dan pada akhirnya Mandawari memperoleh kedudukan tersebut.

Tindakan-tindakan Mandawari yang melakukan taktik-taktik politik untuk menyanggah gelar *mara'dia* tidak hanya terjadi sebelum ia diangkat menjadi *mara'dia* namun pada masa pemerintahannya yang ke tiga kali, terjadi beberapa peristiwa menggambarkan bagaimana sikap Mandawari dalam rangka pengangkatan dirinya sebagai *mara'dia*. Masa pemerintahan yang ke tiga ini tidak jauh beda dengan masa pemerintahan yang sebelumnya, Mandawari masih tetap pro terhadap Belanda, masih gemar bermalas-malasan, dan menghisap candu. Bahkan saat Mandawari menghadiri sebuah acara, tempat minumannya tidak pernah jauh darinya ia senantiasa membawanya (Syah, 1992: 111).

Pada masa pemerintahan Mandawari, Belanda bebas keluar masuk Mandar. Berdagang dengan pedagang pribumi dengan membeli dagangan dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar luar lainnya (Syah, 1980/1981: 75). Mandawari memimpin Balanipa maka Belanda bebas berbuat di Mandar. Kondisi ini memang terbukti bahwa Belanda sangat leluasa memasang harga dagangan di Mandar hingga merugikan rakyat dan lambat laun membuat rakyat sengsara. Kondisi ini dirasakan oleh beberapa petinggi kerajaan namun tidak dapat berbuat banyak setelah Tokape ditangkap oleh Belanda sampai muncullah sosok yang pemberani. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah pengikut dari Tokape selama ia berjuang melawan Belanda. Beliau dikenal sebagai *Mara'dia* Alu yang

sekaligus sebagai *Mara'dia* Malolo Kerajaan Balanipa ia bernama I Calo Ammana I Wewang (Syah 1998).

2. Konflik Mandawari-Ammana I Wewang

Masa pemerintahan Mandawari yang ke tiga kalinya ini merupakan masa dimana Mandawari beserta pengikutnya mengalami konflik dengan kelompok Ammana I Wewang. Artinya, pada periode ini terjadi konflik internal Kerajaan Balanipa seperti yang telah terjadi sebelumnya. Mandawari tetap pada sikapnya yang pro terhadap Belanda dan Ammana I Wewang yang ingin melawan Belanda. Pada akhirnya terjadilah perlawanan rakyat terhadap Belanda yang dipimpin oleh Ammana I Wewang. Perjuangan Ammana I Wewang dikenal sebagai salah satu perjuangan terbesar rakyat Mandar terhadap Belanda yang membawa kerugian besar dari pihak Belanda dan menimbulkan korban yang tidak sedikit.

Perlawanan yang berlangsung pada 1905-1907 tersebut menyebabkan Mandar digempur kembali oleh Belanda dengan kekuatan militer yang tidak sedikit, beberapa kali Belanda melakukan operasi militer untuk mengatasi perlawanan. Latar belakang perlawanan rakyat tersebut adalah :

- a. Pedagang hasil bumi yang *mono-cultural* pada kopra sangat resah karena kopra mereka dibeli dengan harga yang sangat murah, hingga mereka menyelundupkan membawa kopra mereka ke Jawa atau langsung ke Singapura. Pedagang-pedagang tersebut ditangkapi oleh Belanda, ditembaki perahunya hingga tenggelam
- b. Masalah agama yang sangat peka dalam masyarakat Mandar yang seratus persen beragama Islam. Mereka menganggap bahwa penjajah Belanda yang tidak menganut agama Islam itu adalah orang kafir, sehingga mereka menjadi sangat sulit berintegrasi.
- c. Sakit hati Rakyat Mandar karena *Mara'dia* Iboroa alias Tokape ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Pulau Jawa (Mandra, 2002: 9).

Latar belakang perjuangan di atas terutama pada poin satu menggambarkan bahwa Belanda masuk ke Mandar untuk

berdagang hanya untuk memperoleh untung yang besar tanpa memikirkan nasib rakyat. Dilain hal *Mara'dia* Mandawari tidak memperdulikan hal tersebut. Peluang Belanda untuk mengatasi perlawanan sangat kecil, namun akhirnya Belanda dapat mengatasi tersebut atas bantuan Mandawari. Di awal perjuangan pasukan Ammana I Wewang selalu menang melawan pasukan Belanda karena Belanda belum mengetahui medan-medan pertempuran. Belandapun melancarkan politik busuknya dengan jalan mendekati para keluarga pejuang dan raja-raja agar mau bekerja sama. *Mara'dia* I Mandawari terpengaruh dan mengutus I Jalali untuk menyampaikan pesan I Mandawari, agar Ammana I Wewang menghentikan perlawanannya dengan syarat tahta Kerajaan Balanipa akan diserahkan ke Ammana I Wewang. Namun di tolak mentah-mentah dengan alasan bahwa "Saya berjuang bukan untuk menjadi *mara'dia* melainkan untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Mandar dan apa gunanya jadi *mara'dia* kalau kita akan jadi alat dari kaum penjajah" (Mandra, 2002: 16)

Mandawari ingin melepaskan jabatannya sebagai *mara'dia*, itu sebuah tindakan untuk menyelamatkan rakyat dari serangan tentara Belanda atau untuk menghemat peluru dan pasukan Belanda yang akan menjadi korban apabila perjuangan Ammana I Wewang berlanjut. Tentu saja tindakan tersebut untuk menghemat peluru dan pasukan Belanda Mandawari sebagai *mara'dia* saat itu masih dalam pengaruh Belanda, tentunya tindakan Mandawari hanya untuk kepentingan Belanda.

Setelah penolakan tersebut perang semakin sengit, Belanda kewalahan karena medan tempur yang rumit serta benteng pertahanan yang kuat. Mandawaripun saat itu yang masih menjabat sebagai *Mara'dia* Balanipa membocorkan informasi tentang kekuatan pasukan Ammana I Wewang serta jalan-jalan mana yang harus ditempuh oleh pasukan Belanda dalam melancarkan serangannya (Indisch Militair Tijdschrift, De Expeditie naar Zuid-Celebes in 1905-1906). Lambat laun perlawanan Ammana I Wewang dapat diredam dan perlawananpun berakhir ketika Ammana I Wewang tertangkap

oleh pasukan Belanda dan diasingkan ke Belitung. Sikap Mandawari saat itu yang membocorkan informasi penting kepada Belanda semata-mata hanya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai *Mara'dia* Balanipa meskipun usianya pada saat itu sudah sangat tua. Tertangkapnya Ammana I Wewang menguatkan pendapat bahwa Mandawari hanya mengincar kekuasaan dan sudah dibutakan oleh iming-iming Belanda yang akan memberikan kekuasaan terhadap Balanipa.

Diketahui bahwa ketika perjuangan Ammana I Wewang berlangsung, posisi *Mara'dia* Balanipa secara resmi yang disetujui oleh *Appe Banua Kaiyyang* dan masyarakat pada saat itu adalah I Laju Kanna I Doro. Pusat kerajaan saat itu dipindahkan dari Balanipa ke Alu. Sebaliknya Mandawari saat itu sudah tidak dipercaya oleh *Appe Banua Kaiyyang* dan masyarakat, tetapi beberapa pengikutnya masih mengakuinya sebagai *Mara'dia* Balanipa termasuk Belanda. Namun Belanda yang kewalahan mengatasi perlawanan Ammana I Wewang beserta pasukannya memilih untuk mendekati I Laju Kanna I Doro sebagai *mara'dia* yang diakui masyarakat namun tidak berhasil. Mendengar hal tersebut, Mandawari mengutus *Pangnga Ijattia* untuk menghadap ke Gubernur melaporkan kondisi pasukan Belanda yang kewalahan dalam menghadapi Ammana I Wewang dan mengajukan syarat akan membantu Belanda apabila ia dilantik sebagai *Mara'dia* Balanipa dan Gubernur juga setuju dengan hal tersebut.

3. Pelantikan Mandawari Sebagai *Mara'dia*

Mandawari yang ingin diakui gelar *mara'dia* setelah diturunkan secara paksa oleh pendukung Ammana I Wewang melakukakan usaha untuk berangkat ke Makassar dalam rangka pelantikannya sebagai Raja Balanipa yang diakui oleh Belanda. Sesuai dengan pesan Ijattia yang kembali ke Majene bahwa Mandawari akan dilantik menjadi *Mara'dia* Balanipa di Makassar. Usaha Mandawari untuk berangkat ke Makassar diketahui oleh Ilaqju dan pengawas pantai Ammana I Pattowali, dan berusaha untuk menghalangi keberangkatan Mandawari bersama dengan kawan-kawanya. 22 juli 1905, Belanda

berusaha untuk meloloskan Mandawari ke Makassar namun dapat di halangi oleh Puang Mandikang dari Palopo dan sekaligus menyerang barak-barak Belanda dan usaha Mandawaripun gagal total (Syah, 1998: hal. 24).

Akhirnya 9 September 1905 barulah Mandawari berhasil meloloskan diri ke Makassar dan pada 16 September 1905, Mandawari dilantik oleh gubernur Belanda. Namun pelantikan tersebut cacat dimata adat Mandar karena tidak sesuai dengan tradisi adat Balanipa yang seharusnya di lantik oleh *Appe Banua Kaiiyang*.

Setelah pelantikan tersebut Mandawari menandatangani sebuah perjanjian pendek yang berisi sebagai berikut

- a. Bahwa ia (Mandawari *Mara'dia* Balanipa) mengaku takluk di bawah raja Belanda dan Kerajaan Balanipa adalah satu bahagian dari Hindia Belanda, oleh sebab itu dia harus patuh terhadap Belanda dan pada wakilnya yaitu Gubernur Jendral Hindia Belanda.
- b. Bahwa ia (Mandawari *Mara'dia* Balanipa) tidak akan melakukan hubungan kenegaraan dengan kekuasaan asing musuh Belanda
- c. Bahwa ia (Mandawari *Mara'dia* Balanipa) akan menaati segala peraturan mengenai negerinya yang ditetapkan oleh raja Belanda atau oleh wakinya di *Celebes* seterusnya akan menuruti segala perintah yang telah diberikan atau yang akan diberikan kepadanya oleh Gubernur Jendral atau wakilnya di *Celebes* (ANRI: Kontrak Balanipa No. 662)

Pernyataan itu menggambarkan ketika Mandawari memberikan bantuan maka ia akan dilantik di Makassar sebagai *Mara'dia* Balanipa. pada akhirnya Belanda yang mendapat bantuan dari Mandawari dapat menangkap Ammana I Wewang dan Mandawari menjadi *Mara'dia* Balanipa kembali meskipun usianya sangat sudah tua. Namun berselang setahun kemudian 1906 (Boom, 1912: 534) Mandawari mengundurkan diri sebagai *Mara'dia* dan meletakkan jabatannya. Hal tersebut ia lakukan dengan bujukan orang Belanda (*Controleur*) dan setelah turun dari jabatannya Mandawari mendapatkan uang yang dimasukkan dalam buntalan tidak tahu jumlahnya, namun

jumlahnya sekitar ribuan. Beliau juga digantikan oleh *I Laju Kanna I Doro*. (Syah, 1992:113-114)

Mandawari selama karir kepemimpinannya menjabat sebagai *Mara'dia* Balanipa selama tiga periode adalah suatu pencapaian yang tidak semua dapat dilakukan oleh raja-lainnya. Terlebih lagi Mandawari merupakan sosok yang kurang disenangi oleh rakyatnya namun Mandawari dapat menjabat sebanyak tiga kali. Berarti ada 3 kali pengangkatan dan 2 kali pemecatan secara tidak terhormat. Sikapnya yang malas-malasan dan hanya menghisap candu merupakan pendorong utama dalam pemecatannya sebagai *mara'dia* namun sebaliknya merupakan hal yang disukai dari pihak Belanda karena dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk menanamkan pengaruhnya di Mandar. Belanda hanya perlu memberikan candu pada Mandawari maka jalan untuk melakukan perdagangan di Mandar akan mulus. Belanda saat itu membeli kopra di Mandar sangat murah dibandingkan di tempat lain karena Belanda bebas memasang harga. Inilah yang menjadi salah satu penyebab Tokape sangat tidak suka dengan Belanda seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertanyaanya kemudian bahwa Mandawari menjabat sebagai *Mara'dia* Balanipa sebanyak 3 kali namun mempunyai sikap yang tidak sesuai dengan syarat untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Disisi lain juga dapat dilihat dari sekian kali pengangkatan Mandawari sebagai seorang *mara'dia* hanya pada periode pertama saja yang diangkat sesuai dengan adat istiadat ketika ia menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia. Pada periode yang ke-2 dan ke-3 diawali dengan konflik dan akhirnya yang mengangkat Mandawari sebagai *mara'dia* yakni dari pihak Belanda karena Belanda pada saat itu sudah sangat berpengaruh di Mandar.

Mandawari pada masa kepemimpinannya apabila dilihat dari sisi lain merupakan tipikal pemimpin yang politikus lebih memilih jalan negoisasi dari pada perang fisik. Banyak perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh Mandawari meskipun banyak yang merugikan Kerajaan Balanipa saat itu. Namun membawa dampak yang lain yakni

berkurangnya serangan militer Belanda ke Balanipa. Hal ini juga merupakan sikap untuk melindungi Mandar dari tentara militer Belanda. Dan terbukti selama kepemimpinan Mandawari sedikitpun beliau tidak pernah mendapatkan hantaman peluru dari Belanda apalagi hukuman pengasingan karena sikapnya yang lebih suka bernegosiasi. Meskipun dalam setiap negosiasi yang ia lakukan dengan Belanda membawa dampak bagi kerajaan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya kemasyarakatan.

Pengaruh Kebijakan I Mandawari di Kerajaan Balanipa 1870-1906

Sebelum I Mandawari menjadi *mara'dia* di Balanipa, struktur pemerintahan sudah baik, pengangkatan dan pemecatan seorang pemimpin telah diatur langsung oleh adat istiadat dan syarat-syarat yang dimaksudkan telah diwariskan secara turun temurun oleh *mara'dia* ke *mara'dia* selanjutnya. Namun yang terjadi setelah Mandawari memimpin berbeda dengan warisan leluhur yang telah dipedomani sebelumnya. Setelah Balanipa mendapat pengaruh Belanda yang banyak mencampuri urusan kerajaan setelah menanamkan pengaruhnya di Mandar.

Pada bidang politik, selama Mandawari memerintah pada 1870-1872 tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan karena pengaruh Belanda di bidang politik dalam hal ini pemerintahan saat itu masih sangat minim terbukti pengangkatan Mandawari sebagai *mara'dia* masih sesuai dengan hadat. Mandawari masih diangkat oleh *Appe' Banua Kaiyyang*, meskipun pada saat itu Belanda telah menanamkan pengaruhnya di Mandar. Mandawari menjadi *Mara'dia* Balanipa saat itu karena menggantikan ayahnya yang meninggal seperti yang dijelaskan dalam *lontarak* yakni,

Apa nalambi' amateanna Mara'dia Bubeng ana'na mattolai disangan tania todipobusung disanga : "Ammana Wari ditalla' Mara'dia Kecce', ia tobandi Tomelloli' dipauanna Ammana Icalla' "

Artinya :

Setelah tiba waktunya *Mara'dia* Bubeng wafat, putranya yang menggantikan "Ammana Wari dengan gelar *Mara'dia* Kecce', beliau pula yang disebut Tomelloli' atau Ammana Icalla' " (Syah, 1992: 98).

Penjelasan mengenai terangkatnya Mandawari sebagai *Mara'dia* Balanipa yang menggantikan ayahnya mengindikasikan bahwa seorang *mara'dia* di Balanipa yang akan melanjutkan pemerintahannya adalah anaknya. Ternyata di Mandar siapapun yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat menjadi seorang pemimpin meskipun bukan anak dari *mara'dia* yang memerintah sebelumnya maka ia berhak untuk menjadi seorang raja (*Mara'dia*). Seperti pesan I Manyambungi sebagai *mara'dia* pertama di Balanipa yang berbunyi,

Madondong duambongi anna' matea da musorongi dai di pe'uluang, mau ana'u, mau appou mua' tania tonamasayanggi tau maranni, mua matodori kedona masungi pulu-pulunna apa' iamo tu'u ditingngo namarrupu' rupu' lita'.

Artinya:

Besok atau lusa kalau saya (Manyambungi) telah wafat janganlah sekali-kali mengangkat orang menjadi raja atau pamangku adat sekalipun anakku, sekalipun cucuku apabila buka orang yang akan menyayangi rakyat kalau tingkah lakunya kaku dan kasar, perbuatannya tidak senono karena orang itu yang akan menghancurkan negeri (Daud, 2007: 81).

Pesan I Manyambungi ini disampaikan sebelum ia mangkat. Dapat kita lihat maksud dari pesan ini bahwa seorang *mara'dia* di Balanipa tidak mesti merupakan anak serta keluarga dari Raja sebelumnya, apabila ia tidak memenuhi syarat menjadi seorang *mara'dia* maka ia tidak berhak untuk diangkat menjadi *mara'dia*. Pesan I Manyambungi inilah yang dipegang teguh oleh Hadat Balanipa dalam setiap pengangkatan *mara'dia* di Mandar.

Periode pertama akhirnya berakhir pada 1872. Singkatnya pemerintahan Mandawari karena terjadinya konflik internal dengan sepupu sekalinya yakni Tokape. Mandawari yang mendapat dukungan dari Belanda agar ia bebas berbuat apabila Mandawari menjadi *mara'dia* dan Tokape saat itu dianggap pemberontak karena melawan Belanda namun disenangi oleh masyarakat karena membela kepentingan rakyat terutama di bidang perdagangan kopra. Namun setelah Tokape tertangkap oleh Belanda akhirnya Mandawari kembali naik menjadi *Mara'dia* Balanipa pada tahun 1873-1880. ini merupakan periode ke 2 dari pemerintahan Mandawari.

Terangkatnya Mandawari menjadi *mara'dia* tidak lepas dari peran Belanda, Belandalah yang memutuskan bahwa Mandawari yang menjadi pemimin di Balanipa, Belanda yang mengangkat Mandawari menjadi seorang pemimpin. Pada masa inilah Belanda telah masuk dalam sistem pemerintahan di Balanipa Hal itu yang dijelaskan dalam *lontarak*,

Setelah Tokape hilang, sepupu sekalinya kembali menggantikan. Atas kehendak Belanda bernama Imannawari
Ammana Icalla' kembali jadi *Mara'dia*
Balanipa berdasarkan keputusan Belanda
Ammana Icalla' kembali jadi *Mara'dia*
Balanipa atas kehendak Gubernamen (Syah, 1992: 102).

Kutipan di atas mempertegas bahwa Mandawari pada jabatan keduanya diangkat atas keinginan pihak Belanda bukan karena keinginan masyarakat. Belanda sudah terlalu jauh mencampuri urusan pemerintahan di Balanipa dan membawa perubahan terhadap pemerintahan. Pada awalnya pegangkatan *mara'dia* berdasarkan adat istiadat warisan leluhur yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dijelaskan sebelumnya bahwa seorang pemimpin harus menghabiskan waktunya untuk kesejahteraan rakyat, namun apa yang kemudian Mandawari perbuat ketika ia berkuasa kerjanya bermalas-malasan dan hanya menghisap candu. Oleh karena itulah, ia mendapat gelar *Tomelloli*. Hal ini pulalah yang membuat Mandawari tidak disenangi oleh masyarakat.

Perubahan pada struktur pemerintahan di Balanipa saat itu tidak serta merta merubah keseluruhan sistem. Namun ada satu tambahan dari sistem tersebut yakni peran Belanda dalam pemerintahan termasuk urusan pemilihan pemimpin harus dengan persetujuan Belanda seperti yang tercantum dalam *lontarak*. Berselang beberapa tahun masyarakat dan kau Hadat Balanipa betul-betul sudah tidak tahan dengan sikap Mandawari sehingga ia diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh Sanggaria mantan *Mara'dia* Banggae (Syah, 1992: 103-105).

Namun berselang beberapa tahun Mandawari berkonflik dengan Sanggaria. Pada 1885 Sanggaria diturunkan kembali dan Mandawari kembali memimpin. Periode ketiga ini merupakan periode dimana Belanda betul-

betul telah menguasai Kerajaan Balanipa, bahkan Mandar setelah perlawanan Ammana I Wewang dapat teratasi karena bantuan Mandawari. Kebijakan Mandawari yang memberikan ruang yang bebas kepada Belanda membuat perubahan yang sangat banyak di Kerajaan Balanipa. Adat istiadat warisan leluhur yang menjadi acuan lambat laun dilupakan bahkan setelah pengangkatan Mandawari yang dilakukan di Makassar pada tanggal 16 September 1905 oleh Belanda, pupuslah sudah sistem demokrasi ala Balanipa dimana *pappuangan* diangkat oleh *tomabubeng* dan *pappuangang* yang melantik *mara'dia* (Daud, 2007: 51). Perubahan yang terjadi di Balanipa bukan hanya di bidang politik tetapi juga bidang ekonomi

Bidang ekonomi merupakan bidang yang sangat berpengaruh terhadap suatu kerajaan. Faktor ekonomi yang menggerakkan perkembangan kerajaan hingga kerajaan tersebut menjadi maju. Bidang ekonomi pada masa kerajaan, banyak hasil alam yang diperoleh sebesar komoditi yang diperdagangkan di kerajaan tersebut. Di Balanipa masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani menanam berbagai macam tanaman terutama makanan pokok yakni padi dan jagung. Namun di daerah pantai sangat kaya dengan pohon kelapa dan pohon kelapa ini juga merupakan sumber penghasil utama bagi penduduk (Boom, 1912: 525).

Perdagangan di Mandar sangatlah ramai terutama di Balanipa, Pambusuang dan Campalagian yakni pelabuhan Para, Ba'babura dan Bonde (Boom, 1912: 528). Pedagang Mandar merupakan pedagang ulung sekaligus pelaut ulung. Pelayarannya untuk berdagang mencapai wilyah yang sangat jauh sampai ke Sumatera, Straits Settlements, Jawa, Kalimantan dan Maluku (Boom, 1912: 525). Perdagangan di Mandar setelah *Tomepayung* menjabat sudah sangat berkembang dengan adanya badan yang mengurus beacukai perdagangan yang saat itu dikenal dengan nama *Sawwanara*. *Sawwanara* (syahbandar) inilah yang mengurus segala sesuatu tentang perdagangan di Balanipa. Seluruh barang yang keluar dan masuk harus dilaporkan ke *Sawwanara* (syahbandar). Dalam pengaturan harga yang menentukan adalah

mara'dia melalui Syahbandar (Syah, 1992: 19). Pada masa ini masyarakat bebas untuk berdagang kemana saja sebarang jauhnya dan apapun barang dagangannya namun harus tetap melapor ke Syahbandar.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa daerah pantai sangat kaya dengan pohon kelapa. Dalam periode tersebut masyarakat pesisir pantai merupakan pedagang kopra. Kopra dihasilkan dari kebun-kebun petani, kopra juga pada masa itu merupakan komoditi terkenal di jazirah Sulawesi Selatan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi alasan Belanda datang untuk berdagang di Mandar karena tidak hanya kuantitas kopra di Mandar tetapi juga kualitas kopranya juga sangat baik. Pada masa pemerintahan Mandawari Belanda sangat bebas untuk berdagang di Mandar Belanda kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk menjual seluruh minyak dan kopranya ke Belanda namun masyarakat enggan untuk menjualnya ke Belanda karena harga beli yang di tawarkan oleh Belanda sangat murah dibandingkan bila masyarakat menjualnya ke Singapura dan Surabaya saat itu (Syah, 1980/1981: 75).

Tindakan masyarakat yang menjual ke Singapura dan Surabaya inilah yang disebut Belanda bahwa rakyat Mandar melakukan pelanggaran kontrak terhadap Belanda. Dan berusaha menghalangi rakyat untuk berdagang keluar dan pedagang yang menjual kopranya diluar inilah yang disebut oleh Belanda sebagai pencuri (perompak) di laut Mandar ketika terjadi pemberontakan Tokape. Sebelumnya pernah terjadi sebelum Mandawari menjadi *mara'dia*, berdasarkan data yang ada bahwa penyebab serangan militer Belanda hingga pembakaran istana Raja Banggae dan sebagian Balanipa di sebabkan oleh banyaknya perompakan yang terjadi di Laut Mandar. Penyebabnya karena Belanda membeli murah kopra rakyat dan dipaksa untuk menjual ke Belanda. dengan harga murah sehingga merugikan masyarakat.

Pada masa pemerintahan Tokape, rakyat kembali mendapatkan angin segar karena sudah dapat berdagang keluar Mandar tanpa menjual kopra kepada Belanda karena Belanda pada saat pemerintahan Tokape diusir dari Mandar (Syah, 1980/1981: 78-79). Dalam

lontarak juga dijelaskan bahwa pada masa Pemerintahan Tokape, Kerajaan Balanipa menjadi aman (Syah, 1992: 101). Ini mengindikasikan bahwa Belanda pada masa itu sudah di usir dari Mandar.

Ketika Mandawari yang menggantikan Tokape yang diasingkan ke Pacitan, Belanda kembali menanamkan pengaruhnya di Mandar. Pada masa ini pengaruh Belanda sudah sangat besar untuk di bidang ekonomi karena Belanda yang memasang harga di pasaran dan rakyat dipaksa untuk menjual dagangannya terutama kopra. Ini berakibat rakyat merasa sengsara terhadap tindakan Belanda. Mandawari sebagai *mara'dia* tidak dapat berbuat banyak karena kebiasaannya yang bermalas-malasan dan hanya menghisap candu. Apalagi pengang-katannya sebagai *mara'dia* dilakukan oleh Belanda bukan lagi berdasarkan kepada adat istiadat. Jadi dapat dikatakan bahwa Mandawari merupakan *boneka* dari Belanda yang dapat dikontrol sesuka hatinya.

Perubahan di bidang ekonomi ini tentunya membuat rakyat merasa tercekik karena harga yang dipasang oleh Belanda sangat tidak sesuai, peran *mara'dia* saat itu mati suri, bukan lagi *mara'dia* yang menentukan harga barang melainkan Belanda. Rakyat sudah tidak bisa berdagang ke tempat-tempat lain lagi selain Belanda. Kondisi ini pulalah yang mendorong perjuangan I Calo Ammana I Wewang dalam melawan Belanda namun dapat kembali diatasi oleh Belanda pada akhirnya setelah Mandawari turun dari jabatan *mara'dia* karena usianya yang sudah senja.

PENUTUP

Awal kejatuhan Mandar terjadi pada 1870 pada masa pemerintahan I Mandawari sebagai *mara'dia* ke-36 (1870-1906). Dalam periode tersebut, Mandar belum diambil alih oleh Belanda secara penuh terutama soal wilayah, tetapi Belanda telah berhasil masuk ke dalam sistem pemerintahan mempengaruhi struktur hingga memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan. Penandatanganan kontrak-kontrak dengan Belanda merupakan legitimasi kekuasaan yang diperoleh Belanda atas Mandar. disatu sisi Mandar juga tidak dapat berbuat banyak karena terdesak oleh kekuatan Belanda yang semakin kuat di Sulawesi.

Posisi Belanda yang semakin kuat di Sulawesi Selatan pada dasarnya tidak mempengaruhi stabilitas politik di Mandar karena Mandar dalam periode itu belum dikuasai secara penuh. Penguasaan penuh atas Mandar baru terjadi pada tahun 1909. Belanda membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membuat kontrak dan menaklukkan Mandar secara utuh. Berdasarkan kontrak-kontrak tersebut Mandawari mengeluarkan kebijakan kerajaan yang merugikan rakyat saat itu. Kerugian yang dirasakan oleh rakyat kemudian memicu perlawanan terhadap Belanda yang di pelopori oleh Tokape pada 1872 dan Ammana I Wewang pada 1905.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI, Khasanah Kontrak Kerajaan Balanipa.
ANRI, Algemene Secretarie Serie Groote Bundel, BT 23 Mei 1873.
- Arsip Nasional, Memori Van Overgave Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden, F.C.Vorstman
- Abidin, Andi Zainal. 1971. 'Notes on the Lontara' as Historical Sources', *Indonesia*: 159-72.
- Abidin, Andi Zainal. 1999. *Sejarah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Abidin, Andi Zainal. 1983. "The Emergence of early Kingdom in South Sulawesi." *Southeast Asian Studies* 20: 455-491.
- Alimuddin, Ridwan. 2005. *Orang Mandar Orang Laut: Kebudayaan Mandar Mengarungi Gelombang Perubahan Zaman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad 17*. Makassar: INNINAWA.
- Boom, C Noote. 1912. *NOTA Van Toelichting Betreffende Het Landschap Balangnipa* (Albercht & Co: Batavia).
- Daud, Muhammad Amin. 2007. *Struktur dan Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa Mandar*. Balanipa: Lembaga Kerapatan Warga Istiadatq Balanipa Mandar.
- Indisch Militair Tijdschrift, De Expeditie naar Zuid-Celebes in 1905-1906
- Hanoch, Luhukay. 2006. *Memori Asisten Residen W.J. Leids Selama bertugas di Mandar* (Yayasan Kaitupa: Makassar).
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Kemp, P.H. Van Der. 1909. 'Mr. C. T. Elout als minister van Kolonien ', *Bijdragen tot de tabal-,land-en volkenkunde van Nederlandsch Indie*.
- Idham. 2010. *Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*. Mamuju: Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat.
- Mandra, A.M. 2002. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa di Mandar*. Majene: Pemerintah Daerah Kab. Majene.
- Mandra, A.M., dan dkk. 1991. *Lontar Mandar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mappangara, Suriadi. 2004. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sinrang, Syaiful. 1994. *Mengenal Mandar Sekilas Lintas "Perjuangan Mandar Melawan Belanda (1667-1949)*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio.
- Syah, Tanawali Aziz. 1980/1981. *I Calo Ammana I Wewang Topole di Balitung Pahlawan Daerah Mandar Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang : Pemda T.K.I. Prop. Sulsel.
- Syah, Tanawali Aziz. 1992a. *Lontarak 1 Pattodioloang di Mandar* (Taruna Remaja: Ujung Pandang).
- . 1992b. *Lontarak 2 Pattodioloang di Mandar* (Taruna Remaja: Ujung Pandang).
- . 1998. *Sejarah Mandar*. Vol. II. Ujung Pandang: Yayasan Al Aziz.
- Water, Dr. W.C.H. Toe. 1848. 'Beknopte Geschiedenis van Het Makassaarsche Celebes en Onderhoorigheden', *Tijdschrift Vor Nedelands Indie*, X: 3-170.

